EFEKTIVITAS DANA SUBSIDI LANGSUNG TUNAI (SLT) DALAM MENGATASI DAMPAK KENAIKAN HARGA BBM BAGI MASYARAKAT MISKIN

Kuncoro Bayu Prasetyo
Antari Ayuning Arsi
Hartati Sulistyo Rini
Jurusan Sosiologi - Antropologi FIS Unnes

Abstract

Subsidi Langsung Tunai (SLT) is one of the government programs to help poor people to face the effect of the increasing of gas price policy. The data of the receivers collect from BPS's list. Government hopes that the effect of the increasing price of gasoline do not give impact to the increasing number of poor people. The distribution of SLT was done periodically each three months, begins on October 2005 until September 2006. The SLT assistance distributed in cooperation with the post office across the country which reach the remote area. The SLT receivers confessed that this program is very helpful for them in fulfilling their daily needs in the difficult situation recently. There are various uses of the SLT's assistance among the receivers. Most of them spent the assistance for consuming daily needs, paying education cost, buying medicine, paying debt and other social activities such as for charity. The SLT distribution done by the government was not effectively helping poor people. They have already spent the assistance just only in one or two weeks. Implementing the SLT assistance program like this is such as Santa clause model which can give bad physiological impact for instance laziness and dependency among the receiver to the government. There for reevaluation is needed for the type of assistance, distribution model and other related technical factors, so that in the future the government assistance for poor people can be used effectively and optimally.

Key words: SLT assistance, gasoline, poor people, effective.

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia sejak masa Orde Lama telah menyadari arti strategis minyak bumi dalam usaha pembangunan negara dan masyarakat. Minyak bumi atau yang produk turunannnya lebih dikenal dengan Bahan Bakar Minyak (BBM), terdiri terdiri atas premium, solar, minyak tanah, minyak bakar dan avtur, merupakan salah satu penggerak utama mesin pembangunan dan roda kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah merasa berkepentingan untuk dapat mengendalikan produksi serta harga BBM di Indonesia. Kegoncangan harga BBM jika tidak dikendalikan akan menjadi faktor instabilitas ekonomi negara karena dampaknya yang akan berimbas di berbagai aspek. Oleh sebab itu maka pemerintah mendirikan perusahaan minyak nasional Pertamina pada dekade 60—an, sehingga dapat melakukan regulasi yang terkendali terhadap komoditas minyak bumi di dalam negeri.

Hingga saat ini Pertamina merupakan pemain tunggal dan pemegang monopoli distribusi Bahan Bakar Minyak di Indonesia. Melalui Pertamina, pemerintah memiliki kemampuan untuk mengontrol harga Bahan Bakar Minyak di dalam negeri, serta mengatur jumlah pasokan dan distribusinya. Dalam pengaturan tingkat harga, pemerintah memerlukan untuk menjaga harga BBM agar dapat terjangkau oleh masyarakat maupun dunia industri. Jika harga BBM mengacu pada harga di pasar internasional, dikhawatirkan akan menyebabkan seretnya roda perekonomian dan sengsaranya golongan masyarakat karena harga minyak di pasar internasional tidak akan terjangkau oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas memiliki daya beli rendah. Salah satu mekanisme yang dilakukan pemerintah dalam menangani masalah di atas adalah dengan memberikan subsidi terhadap BBM yang dijual di dalam negeri. Besaran subsidi tersebut bervariasi tergantung dari jenis BBM yang ada.

Namun kebijakan pemberian subsidi BBM ternyata menyimpan sejumlah bara dalama sekam. Pada saat Indonesia dilanda krisis ekonomi pada tahun 1997 yang dimulai dengan anjloknya nilai tukar rupiah terhadap mata uang acing, ditambah lagi dengan kenaikan harga minyak dunia yang meningkat pesat wiring dengan kebutuhan minyak dunia yang semakin besar dan juga sebagai akibat krisis politik dan militer di kawasan Timer Tengah yang notabene adalah produsen utama minyak dunia, maka besaran subsidi BBM yang hares dikeluarkan pemerintah otomatis juga membengkak. Program subsidi BBM mulai dirasakan membebani perekonomian negara. Sebagaimana dilaporkan dalam neraca APBN 2005 anggaran untuk subsidi BBM dialokasikan sebesar Rp 39,796 triliun. Hal itu sama saja dengan menghabiskan 12,34 % dari total RAPBN yang sebesar Rp 322,438 triliun (Depkeu, 2005)

Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memegang tampuk kekuasaan sejak Oktober 2004, akhirnya mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi subsidi BBM secara drastis pada 1 Oktober 2005, setelah sebelumnya juga melakukan penyesuaian harga BBM pada 1 Maret 2005. Keputusan pengurangan subsidi BBM yang dengan kata lain berarti menaikkan harga BBM tentu saja sangat tidak populer di mata masyarakat dan menimbulkan aksi protes dan pemogokan di banyak tempat di Indonesia. Kebijakan tersebut dianggap tidak tepat waktu karma disaat kebutuhan hidup meningkat dan biaya pendidikan dan kesehatan yang semakin melambung, rakyat Indonesia terbebani lagi dengan kenaikan harga BBM yang telah menjadi kebutuhan sehari – hari. Dan sebenamya bukan hanya kenaikan harga BBM ini saja yang menambah beban masyarakat, tapi terlebih lagi adalah efek domino dari kenaikan harga BBM ini. Kenaikan harga BBM otomatis akan membuat biaya transportasi, harga-harga kebutuhan pokok dan barang-barang lain menjadi naik pula sehingga meningkatkan laju inflasi (Tabel 3). Hal inilah yang sebenarnya sangat membebani rakyat, terutama warga miskin.

Pemerintah menyaclari bahwa pengurangan subsidi yang berakibat dengan kenaikan harga BBM akan menambah beban ekonomi masyarakat terutama yang dikategorikan sebagai masyarakat miskin. Untuk itu bersamaan dengan keputusan dinaikkannya harga BBM, pemerintah juga meluncurkan program kompensasi atas kenaikan harga BBM bagi masyarakat miskin yang disebut sebagai Subsidi Langsung Tunai (SLT). Penerima dana SLT adalah keluarga miskin yang datanya diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Dengan adanya program SLT pemerintah berharap kenaikan harga BBM tidak akan menambah jumlah penduduk miskin, bahkan sebagaimana dikatakan kepala Bappenas, diharapkan dengan adanya SLT angka kemiskinan dapat diturunkan dari 16,65% menjadi 12,69 % (Media Indonesia, 31/10/2005)

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui proses penyaluran dana SLT kepada warga miskin; mencari gambaran yang lebih jelas mengenai warga miskin penerima SLT dalam menyikapi clan memanfaatkan dana yang mereka terima; serta melihat sejauh mana kemanfaatan SLT dalam mengatasi timbulnya dampak akibat kenaikan harga BBM

Hasil penelitian diharapkan bisa memberi gambaran yang lebih jelas mengenai pola penyaluran dan pemanfataan SLT oleh masyarakat penerima, yakni keluarga miskin, serta melihat apakah SLT yang ditujukan untuk mengatasi dampak kenaikan BBM benar-benar dapat menjadi solusi yang tepat dan efektif. Dengan demikian pada akhirnya dapat dilihat apakah kebijakan SLT sudah tepat sasaran dan tepat guna bagi masyarakat, ataukah masih perlu perbaikan. Melalui gambaran yang lebih jelas ini, diharapkan pihak-pihak yang berkompeten menentukan kebijakan dapat mengambil langkah selanjutnya apakah kebijakan SLT perlu dilanjutkan, disempurnakan atau bahkan diganti dengan kebijakan lain yang lebih efektif. Jika alternatif kedua dan ketiga yang terjadi, maka dimungkinkan untuk dilakukan penelitian lanjutan dalam rangka mencari langkah-langkah menyernpurnakan kebijakan atau bahkan mencari alternatif kebijakan baru yang lebih efektif.

Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang akan selalu muncul dari waktu ke waktu dalam kehidupan masyarakat, dan merupakan bagian yang fungsional bagi eksistensi masyarakat (Sairin, 2002). Namun bukan berarti kemudian upaya-upaya penanggulangan kemiskinan menjadi tidak perlu dilakukan. Sebagaimana halnya fenomena, kriminalitas, upaya-upaya untuk menekan kemiskinan harus dilakukan secara simultan.

Di Indonesia, fenomena kemiskinan mulai muncul secara terbuka dalam berbagai diskursus semenjak diterbitkan buku mengenai kemiskinan yang ditulis oleh Masri Singarimbun dan DH Penny pada tahun 1976, Penduduk dan Kemiskinan: Kasus Sriharjo di Pedesaan Jawa. Sebelum itu, orang masih malu-malu berbicara mengenai kemiskinan di Indonesia karena fenomena kemiskinan dipandang sebagai aib dalam sebuah pembangunan, dan dapat menurunkan citra bangsa (Sairin,2002). Setelah wacana kemiskinan mulai terbuka oleh terbitnya buku tersebut, berbagai penelitian kemudian banyak dilakukan oleh para pakar untuk lebih menyingkap lagi masalah – masalah kemiskinan di Indonesia.

Pemerintah Indonesia mulai melakukan upaya penanggulangan kemiskinan yang nyata sejak masa pemerintahan Orde Baru mencanangkan program pembangunannya tahun 1969. Program-program seperti

Keluarga Berencana, bantuan kredit usaha kecil, Dana Inpres baik untuk pendidikan dan kesehatan, maupun desa tertinggal (SD Inpres, Puskesmas, IDT) merupakan sebagian dari upaya yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi dan mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Dengan adanya berbagai program pembangunan tersebut secara perlahan angka kemiskinan di Indonesia dapat terns ditekan sehingga pada awal dan pertengahan dasawarsa 90-an, Indonesia dikenal sebagai salah satu dari Keajaiban Asia (The Asia Miracle) atau negara-negara Asia yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang mengesankan bersama-sama dengan Malaysia, Thailand, China dan Korea.

Namun kebijakan ekonomi Indonesia yang menganut sistem liberalisasi ekonomi sangat rentan terhadap situasi global yang terjadi. Gejolak ekonomi internasional akan berpengaruh terhadap perekonomian dalam negeri melalui efek term of trade, efek nilai tukar dan efek tingkat suku bunga (Sri Mulyani dalam Sutrisno, ed.,1995). Hal itu terbukti ketika tahun 1997 resesi ekonomi melanda dunia. Perekonomian Indonesia terkena imbasnya dan menjadi kolaps. Nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing merosot drastis, hutang luar negeri meningkat tajam, akibat perubahan kurs, tersebut. Begitu pula semua kebutuhan konsumsi maupun industri yang berasal dari import melambung harganya. Akibatnya daya beli masyarakat melemah, banyak industri gulung tikar, PHK besar-besaran terjadi di banyak perusahaan.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pun meningkat pesat sejak krisis ekonomi melanda Indonesia. Jika pada masa pemerintahan Orde Baru angka kemiskinan selalu menunjukkan kecenderungan menurun dari tahun ke tahun, maka sebagai akibat krisis ekonomi pada 1997 jumlah penduduk miskin di Indonesia melonjak dengan drastis. Mengacu pada data Bappenas, tahun 1996 jumlah penduduk miskin adalah 22, 5 juta atau 11 % dari total populasi di Indonesia, namun pada tahun 1998 jumlahnya naik secara drastis menjadi 50 juta jiwa atau 24 % dari jumlah penduduk Indonesia.

Pada tahun 2005, berdasarkan pendataan penduduk miskin yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS), diperkirakan jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 62 juta jiwa atau 15,5 juta rumah tangga. Jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan penduduk Indonesia yang mencapai 218 juta jiwa, maka jumlah tersebut adalah 28,44 % dari total jumlah penduduk. (Media Indonesia, 16/09/2005)

Ada beberapa kebijakan yang dapat dilakukan suatu pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan dan perbaikan distribusi pendapatan masyarakat, salah satunya adalah dengan kebijakan subsidi bagi rakyat (Sri Mulyani dalam Sutrisno,ed., 1995). Subsidi biasanya diterapkan terhadap komoditas – komoditas yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat dan berpengaruh besar terhadap situasi perek-onomian makro. Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan salah satu komoditas yang vital dalam menggerakkan roda ekonomi masyarakat, sehingga pemerintah melakukan kebijakan subsidi harga BBM agar terjangkau oleh masyarakat, terutama masyarakat miskin yang memiliki daya beli rendah. Konsumsi

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin Indonesia

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	% Dari Total Penduduk
1976	54, 2 juta	40 %
1981	40,6 j uta	27%
1990	27,1 juta	15 %
1996	22),5 juta	11 %
1998	50 juta	24 %
2002	38 juta	18 %

Sumber : Bappenas dalam Marie Muhammad, 2004

Tabel 2. Kenaikan Harga BBM per 1 Oktober 2005

No	Jenis BBM	Harga Lama	Harga baru (per 1. Ok-t 2005)		% Kenaikan
1	Premium		Rp 2.400,-	Rp 4.500,-	87.5 %
2	Solar		Rp 2.100,-	Rp 4.300,-	105%
3	Minyak Tanah		Rp 700.-	Rp 2.000.-	186 %

Sumber : Kompas. I Oktober 2005

Tabel 3. Laju Inflasi Tahun 2005

Bulan	Tingkat Inflasi (%)
Januari	1,43
Februari	-0,17
Maret	1,91
April	0,34
Mei	0,21
Juni	0,50
Juli	0,78
Agustus	0,55
September	0,69
Oktober	8,70

Sumber: www.bps.go.id

BBM di tanah air dari tahun ke tahun semakin meningkat seiring laju pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan konsumsi BBM ditambah dengan kenaikan harga minyak dunia yang terjadi sejak akhir 2004 menjadikan beban anggaran negara untuk pemberian subsidi BBM meningkat. Berdasar data RAPBN 2005, pada awalnya anggaran untuk subsidi harga BBM dipatok sebesar Rp 19,00 trillun Dari total anggaran Rp 266,22 triliun. Namun dikarenakan situasi yang berubah pada anggaran APBN–Perubahan, angka subsidi tersebut membengkak lebih dani 109 % menjadi Rp. 39,796 trillun. (depkeu, 2005). Pembengkakan tersebut akan menjadi lebih besar lagi seandainya kebijakan subsidi tidak dikurangi pada tahun 2005. Pemerintah mengasumsikan jika subsidi BBM tidak dikurangi, maka anggaran yang diperlukan untuk subsidi pada tahun 2005 akan memerlukan Rp 60, 135 tniliun.

Adanya subsidi BBM dalam kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia memang penuh dengan dilema. Di satu sisi subsidi sangat diperlukan karena sebagian besar masyarakat Indonesia masih mempunyai daya beli yang rendah terhadap BBM, jika subsidi dicabut maka banyak masyarakat tidak akan mampu menjangkau harga minyak yang tinggi dan imbasnya akan dirasakan pula dalam berbagai sektor ekonomi yang lain. Ongkos transportasi pasti akan naik, begitu pula berbagai kebutuhan konsumsi masyarakat akan naik seiring dengan meningkatnya biaya produksi dan distribusi. Selanjutnya akan berimbas pula pada buruh yang akan menuntut kenaikan upah karena biaya kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Dengan meningkatnya upah buruh maka ongkos produksi akan semakin bertambah dan bagi indistri yang tidak mampu menanggung akibat tersebut maka akan terjadi PHK atas buruh-buruhnva karena ketiadaan biaya tambahan untuk menaikkan upah buruh. Boleh dikatakan dicabutnya subsidi akan menimbulkan multiple efek yang sifatnva berantai, akan berimbas pada semua aspek kehidupan masyarakat dan semua sektor perekonomian.

Sementara disisi lain pencabutan subsidi BBM dan menverahkan pergerakan harga pada mekanisme pasar saat ini nampaknya juga sudah sangat mendesak untuk dilakukan. Subsidi BBM yang jumlahnya mencapai puluhan triliun tentu saja akan memberatkan perekonomian negara. Selain itu perbedaan harga yang menyolok antara harga BBM di Indonesia dan di pasar Internasional menciptakan peluang diselundupkannya BBM dari Indonesia ke luar negeri sebagaimana banyak disinyalir marak pada tahun-tahun terakhir. Pelakunya tidak jarang justru melibatkan oknum Pertamina dan aparat-aparat pemerintah yang lain.

Pada akhirnya pemerintah memang menyadari bahwa subsidi BBM harus dihilangkan. Namun untuk mencegah gejolak dan juga mengantisipasi kesiapan masyarakat pencabutan subsidi tersebut dilakukan secara bertahap. Pada tahun 2005 telah dilakukan dua kali kebijakan menaikkan harga BBM, yang pertama pada 1 Maret 2005. Sedangkan kenaikan harga yang kedua. dan merupakan kenaikan harga BBM yang paling drastis dan mengejutkan banyak masyarakat adalah yang ditetapkan pemerintah pada 1 Oktober 2005 melalui Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2005. Kenaikan harga BBM tersebut lebih jelasnya dapat dilihat dalam Tabel 2.

Pemerintah menyadari bahwa keputusan pencabutan subsidi BBM walaupun dilakukan secara bertahap akan menimbulkan dampak yang kompleks dalam kehidupan masyarakat. Bagaimanapun harus diakui bahwa saat ini BBM memegang, pengaruh dalam hampir segala aspek kehidupan masyarakat. Hal itu terbukti dengan terjadinya kenaikan harga BBM pada 1 Oktober Oktober 2005, menyebabkan laju inflasi meningkat tajam setelah diberlakukannya kebijakan tersebut. Data dari BPS menunjukkan bahwa pasca kenaikan BBM 1 Oktober, tingkat inflasi mencapai kenaikan yang tertinggi dibandingkan bulan-bulan sebelumnya dalam tahun 2005. Tabel berikut menunjukkan tingkat inflasi tahun 2005.

Masyarakat miskin dipandang sebagai golongan yang akan mengalami beban penderitaan paling besar atas kenaikan harga BBM. Salah satu usaha pemerintah untuk mengurangi beban tersebut, diluncurkan kebijakan pemberian kompensasi kenaikan harga BBM yang lebih populer dengan sebutan Subsidi Langsung Tunai (SLT). Dalam mekanismenya, kepada setiap keluarga miskin diberikan dana SLT sebesar Rp 100.000,- per bulan selama 1 tahun, terhitung sejak 1 Oktober 2005. Dana SLT tersebut diterimakan langsung untuk tiga bulan, sehingga pada penerimaan bulan Oktober 2005 masing-masing keluarga miskin mendapatkan kucuran dana subsidi tunai sebesar Rp 300.000,-. Jumlah keluarga miskin yang menerima dana SLT diambil dari data Rumah Tangga Miskin BPS sebesar 15,5 juta K.K. Dengan angka RTM 15,5 juta KK dikalikan Rp 100 ribu selama tiga bulan, maka dana yang harus dikeluarkan pemenntah untuk Subsidi Langsung Tunai sekitar Rp 4,8 triliun.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan secara kualitatif-deskriptif Denzin dan Lincoln (dalam Moleong, 2004) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menggunakan later alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada. Metode yang biasanya digunakan adalah wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumen. Untuk memperoleh deskripsi yang ninci diambil beberapa informan sebagai sumber informasi penelitian.

Penelitian kualitatif juga merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau kelompok. Menurut Lofland dan Lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebi.hnNa adalah data tambahan seperti clokumen clan lain-lain.

Teknik pengumpulan data utama (data primer) dalam penelitian ini akan dilakukan dengan wawancara dan pengarnatan. Data tersebut akan diduk-ung oleh data-data tambahan (data sekunder) berupa data statistik, kebijakan pemerintah dan buku-buku literatur yang mendukung.

Secara spasial, rencana penelitian ini akan dilakukan pada keluarga miskin yang tinggal di Kelurahan Sekaran, Kecarnatan Gunungpati, Kota Semarang. Solaro karena pengenalan lokasi yang sudah cukup baik, pemilihan lokasi juga didasarkan pada ciri masyarakat yang khas di kelurahan Sekaran, dimana masyarakat Sekaran merupakan peralihan antara masyarakat rural dan urban, baik sebagai akibat berubahnya status administratif dari desa di wilayah kabupaten Semarang menjadi kelurahan kota dibawah pemerintah kota Semarang, maupun perubahan yang terjadi sebagai akibat membanjimya pendatang di Kelurahan Sekaran beserta segala konsekuensi di bidang sosial, budaya clan ekonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Lokasi Penelitian

Kelurahan Sekaran merupakan bagian administratif dari Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah. Luas wilayah kelurahan sekaran meliputi 490 ha, yang terbagai dalam satuan administratif 7 RW dan 26 RT.

Sebelum bergabung dengan Kota Semarang, dahulu kelurahan Sekaran merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Semarang yang berpusat di Ungaran. Ada 5 dusun yang berada, di Kelurahan Sekaran, yaitu Kampung Sekaran, Banaran, Bantar Dowo, Bangkong dan Persen. Namun seiring dengan perpinclahan status dari desa di kabupaten menjadi kelurahan kota, maka status administratif dusun digantikan oleh satuan administratif RW (Rukun Warga), yaitu : RW I terdiri dari 5 RT, RW II terdiri dari 3 RT, RW III terdiri dari 3 RT, RW IV terdiri dari 6 RT, RW V terdiri dari 5 RT, RW VI terdiri dari 2 RT, dan RW VII terdiri dari 2RT.

RW I, II dan III merupakan eks wilayah dusun Sekaran, RW IV dan V merupakan eks wilayah dusun Banaran, RW VI merupakan wilayah eks dusun Persen Sementara RW VII merupakan gabungan antara eks wilayah dusun Bangkong dan Banjardowo. Adapun batas wilayah Kelurahan Sekaran adalah: Sebelah utara Kelurahan Sukorejo, Kec. Gunungpati, Sebelah selatan Kelurahan Patemon, Kec. Gunungpati, Sebelah barat Kelurahan Kalisegoro, Kec. Gunungpati, Sebelah timur Kelurahan Srondol Wetan.

Jarak Kelurahan Sekaran dari pusat pemerintahan kecamatan adalah 5 km, sementara dari pusat administrasi pemerintah kota adalah 8 km.

Gambaran Penduduk Miskin Kelurahan Sekaran

Berdasarkan data monografi Kelurahan Sekaran, pada tahun 2005 jumlah penduduknya adalah 5.839 jiwa atau 412 KK, terdiri atas 2.984 laki-laki dan 2.839 perempuan. Mayoritas penduduk Sekaran menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian dan jasa. Sektor pertanian masih cukup dominan di kelurahan Sekaran karena pada awalnya kelurahan Sekaran adalah daerah pertanian yang memiliki banyak lahan saxvah, kebun dan tegalan. Sementara sektor jasa mulai berkembang seiak dipindahkannya kampus Universitas Negeri Semarang pada dekade 90-an di kelurahan Sekaran. Banyak penduduk di Kelurahan Sekaran yang kemudian membuka usaha jasa rumah kos bagi mahasiswa, jasa warung makan, toko kelontong, dan sebagainya.

Dari total 5.839 jiwa penduduk Kelurahan sekaran pada pendataan oleh BPS tahun 2005, diketahui jumlah penduduk yang masuk kategori miskin adalah 1957 jiwa atau 33,5% dari total populasi. Jika diukur dengan unit satuan KK maka Jumlah KK miskin adalah 464 KK atau 32,8 % dari total penduduk 1.412 KK.

Penduduk miskin di kelurahan sekaran mayoritas bekerja sebagai buruh tani, dan buruh bangunan. Selain itu sebagian yang

Tabel 4. Jumlah Penduduk Kelurahan Sekaran
Tahun 2005

No	Penduduk	Jumlah
1	Laki – Laki	2.984
2	Perempuan	2.854
Jumlah Jiwa		5.8939 jiwa
Jumlah KK		1.412 KK

Sumber : Data monografi Kelurahan Sekaran

Tabel 5. Penduduk Miskin Kelurahan Sekaran
berdasar Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (KK)
1	Buruh Tani	205
2	Buruh Bangunan	159
3	Bakul	37
4	Buruh Pabrik/Harian	33
5	Tukang Batu	3
6	Petani	3
7	Sopir	2
8	Cleaning service	3
9	Pemulung	6
10	Penjahit	1
11	Pernbantu Rumah Tangga	2
12	Pengangguran	10
	Jumlah	464

Sumber : Data survai BPS 2005

lain berprofesi sebagai bakul, pernulung serta ada pula yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Secara lebih jelas, gambaran penduduk miskin di Kelurahan Sekaran berdasarkan pekerjaannya dapat dilihat pada Tabel 5.

Pola Penyaluran SLT

Pengambilan dana SLT ini dilakukan selama tiga bulan sekali. Sejak bulan Oktober 2006 sampai pada saat penelitian ini dilakukan, terdapat variasi dalam jumlah penerimaan dana SLT. Ada yang sudah 4 kali, 3 kali bahkan ada juga yang baru menerimanya 1 kali walaupun jumlahnya dirangkap dengan penerimaan sebelumnya. Hal ini terjadi karena ada informan yang pada awalnya belum menerima dana SLT, dan kemudian namanya disusulkan. Setiap kali periode penerimaan, masyarakat menerima uang sebesar Rp 300.000-. Jumlah uang ini utuh dan tidak dipotong oleh pihak manapun dan dengan alasan apapun. Namun ada juga salah satu penerima dana SLT ini yang memberikan uangnya sejumlah Rp 10.000,- dengan sukarela kepada orang yang telah mendaftarkannya. Alasannya adalah sebagai tanda. terima kasih karena telah membantunya untuk menjadi penerima dana SLT.

Dalam melakukan pendataan calon penerima SLT, pihak kelurahan bekerja sama dengan masyarakat umum dan perangkat pemerintahan untuk melaksanakanannya. Ada yang didaftarkan oleh ketua RT setempat, oleh Sekretaris Kelurahan dan ada pula yang didaftarkan oleh aktivis kepemudaan di desa Sekaran. Dalam pendaftaran ini, masyarakat tidak terlalu direpotkan dengan persyaratan uang diajukan oleh pihak kelurahan. Masyarakat cukup mengumpulkan KTP dan KK saja untuk melengkapi persyaratannya. Dengan adanya peran serta dari masyarakat dan aparat desa tersebut, diharapkan tidak akan terjadi kesalahan dalam pendataan penerima dana SLT. Schingga dana SLT tersebut dapat sampai pada orang yang tepat dan yang sangat membutuhkan.

Di Kelurahan Sekaran, pengambilan SLT dilakukan di Kantor Pos Unnes. Lokasi ini dinilai sangat tepat oleh semua responden, karena lokasinya yang dekat dengan tempat tinggal mereka sehingga bisa dijangkau dengan berjalan kaki. Seperti pada saat pendataan, syarat pengambilan dana juga menggunakan KK dan KTP. Syarat ini dirasakan sangat mudah dan tidak memberatkan para penerima dana SLT.

Pada awalnya, saat pengambilan dana SLT terjadli kekacauan, karena para calon penerima SLT saling berdesak-desakan dan berebut untuk mendapatkan dana SLT. Bahkan salah seorang narasumber, Saisah, pernah sampai terjatuh gara-gara berdesak-desakan. Hal ini disebabkan juga oleh kurangnva kesiapan para petugas penyalur dana SLT ini. Namun pada periode-periode berikut kondisinya sudah menjadi baik dan lebih teratur. Setiap kali pengambilan dana SLT, ada nomor urutnya dan dipanggil setiap kelompok masing-masing sepuluh orang, serta ada polisi yang menjaga lokasi.

Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Penerima SLT

Masyarakat miskin di Kelurahan Sekaran yang menerima SLT sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai buruh tani, buruh bangunan, pemulung, pekerja serabutan atau bahkan menganggur. Rata-rata penghasilan mereka adalah Rp 190.000,- sampai dengan Rp 700.000,-. Pendapatan yan. didapat ini pun belum merupakan yang pendapatan bersih karena, dalam kenyataannya terpotong oleh konsumsi-konsumsi barang yang lain seperti membeli rokok dan sebagainya. Ditambah lagi dengan kondisi bahwa mereka bekerja tidak setiap hari namun hanya pada saat dibutuhkan tenaganya saja. Belum lagi apabila mempunyai tanggungan anggota keluarga yang besar, yang sangat memberatkan. Oleh karena itulah maka penghasilan mereka tiap bulannya tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka.

Di samping itu, ada juga masyarakat penerima SLT yang masih memiliki pekarangan atau kebun yang menghasilkan uang. Biasanya yang mereka petik hasilnya adalah buah rambutan. Rambutan yang dipanen, la jual kepada pedagang atau dijual langsung di pinggir jalan. Rambutan tersebut dia jual dengan harga Rp 1.000,00 - Rp 2.500,00 per ikat tergantung kualitas dan waktu panen. Jika dia panen sebelum orang-orang kebanyakan panen maka dapat dijual lebih mahal atau apabila dijual pada musim panen rambutan harganya akan lebih tinggi.

Penerima bantuan SLT rata-rata sudah memiliki tempat tinggal sendirl. Tempat tinggal yang dimiliki oleh masyarakat penerima SLT rata-rata belum permanen. Namun ada juga yang memiliki rumah yang sebagian dibangun dengan papan dan sebagian lagi sudah dibangun dengan tembok (permanen). Rumah mereka rata-rata juga masih berlantaikan tanah. Isi rumah mereka pun sangat sederhana. Ada diantara mereka yang memiliki sepeda motor, namun fungsinya hanyalah untuk bekerja dan tidak digunakan untuk kegiatan yang lain. Barang-barang elektronik yang ada pun jumlah dan jenisnya sangat terbatas. Mereka hanya memiliki radio usang atau televisi yang merupakan pemberian pihak lain.

Dalam pemanfaatan bahan bakar minyak (BBM) pun, mereka berupaya untuk menggunakannya seminimal mungkin. Bahkan dalam hal memasak pun mereka lebih memilih menggunakan kayu bakar. Alasannya adalah sebagai bentuk penghematan karena kayu bakar yang dibutuhkan tersebut tidak perlu membeli. Di samping itu, dalam memasak terdapat juga masyarakat yang tetap menggunakan BBM berupa minyak tanah namun dalam takaran yang tidak terlalu banyak. Mereka hanya menggunakan minyak tanah untuk menyalakan api atau membesarkan api ketika memasak. Dalam sebulan, rata-rata mereka menghabiskan minyak tanah 5 liter sampai 10 liter Selain minyak tanah, ada juga diantara mereka yang menggunakan bensin untuk bahan bakar sepeda motor yang dimiliki. Setiap bulannya, rata-rata menghabiskan 60 liter bensin. Sepeda motor itupun hanya digunakan untuk bekerja.

Kondisi ini masih diperparah lagi dengan adanya kenaikan harga BBM yang bepengaruh terhadap sektor yang lain. Contoh nyata yang dapat dilihat yaitu adanya kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok yang semakin tinggi. Sebagai makanan pokok, harga beras mengalami kenaikan dari Rp 3.000,- menjadi Rp 5.000,-. Sehingga mereka yang hidup pas-pasan atau bahkan yang serba berkekurangan tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka dengan balk. Sebagai akibatnya adalah ada diantara mereka yang terlibat hutang mencapai jutaan. Hal ini masih ditambah lagi dengan situasi dan kondisi pendidikan di negara kita yang cenderung semakin mahal. Sehingga orang tua murid juga harus menyediakan uang lebih untuk membeli buku atau bahkan meminta keringanan dari pihak sekolah bagi yang tidak mampu membayarnya.

Pola Pemanfaatan Dana SLT

Semua informan mengungkapkan bahwa dana SLT yang mereka terima dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari seperti membeli beras, minyak, belanja sayur dan kebutuhan pokok lainnya.

Selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dana SLT tersebut oleh beberapa narasumber yang masih menanggung anak atau cucu yang masih bersekolah, juga dimanfaatkan untuk biaya pendidikan anak atau cucu, yaitu membayar uang sekolah dan membeli buku-buku. Mbah Jumali misalnya, mengatakan bahwa dana SLT tersebut ia gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan pendidikan cucunya yang masih kelas 4 SD, yang masih menjadi tanggungannya Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ngasiani, yang masih menanggung 2 orang anak yang duduk di kelas 3 SMA dan 5 SD. Demikian juga dengan Taspan, yang masih harus membiayai sekolah anaknya yang duduk di kelas 5 SD, serta narasumber Palal yang masih membiayai sekolah kedua anaknya yang duduk di kelas 3 MTs dan 2 MI. Satu-satunya narasumber yang tidak memanfaatkan dana SLT untuk biaya pendidikan adalah Mbah Saisah, seorang janda yang sudah tidak mempunyai tanggungan sama sekali.

Beberapa informan juga mengungkapkan jika dana SLT yang diterima juga dipakai untuk membayar hutang yang mereka miliki. Ngasiani misalnya, mempunyai tanggungan hutang sebesar Rp. 1.500.000,00. Sebagian dana SLT yang dia peroleh digunakannya untuk membayar sebagian hutangnya. seorang narasumber lain, Taspan, bahkan mempunyai tanggungan hutang mencapai lima Juta Rupiah, dan dia mengatakan bahwa sebagian dana SLT yang diperolehnya digunakan untuk mencicil hutang-hutangnya. Sementara informan lainnya, Ngasiani juga mengungkapkan dana SLT yang ia terima sebagian juga dimanfaatkan untuk berobat penyakit jantung dan asma yang dideritanya. Setiap kali berobat dia harus mengeluarkan uang Rp 200.000,00 sampai Rp 300.00000 tiap dua bulan sekali. Karena itu dia merasa bersyukur dengan tambahan dana SLT dia dapat menebus obatnya tanpa harus berhutang.

Hal yang cukup menarik dari penggunaan dana SLT oleh para narasumber adalah, sebagian dari mereka juga memanfaatkan dana tersebut untuk kegiatan sosial, yaitu nyumbang ketika ada tetangga mereka yang sedang mempunyai hajat atau meninggal. Tradisi nyumbang bagi masyarakat Jawa, sebagaimana diungkapkan oleh seorang antropolog Hildred Geertz, memang merupakan suatu kewajiban komunal yang sulit untuk dihindari, sehingga bagi seorang yang miskin sekalipun merasa wajib untuk dapat memberikan sumbangan kepada kerabat atau tetangga yang sedang mempunyai hajat, sekalipun resikonya harus sampai berhutang.

Hal menarik lainnya yang diperoleh adalah bahwa ada beberapa informan yang mengungkapkan ketergantungan para narasumber terhadap konsumsi BBM ternyata sangat minim, bahkan ada seorang informan yang tidak pernah memanfaatkan minyak tanah sama sekali. Oleh karena itu menurut mereka kenaikan harga BBM sampai harga berapapun tidak akan mempengaruhi mereka. Untuk keperluan memasak misalnya, mereka menggunakan kayu bakar. Minyak tanah hanya mereka gunakan membantu menyalakan kayu atau jika kayunya masih agak basah. Mereka tidak mengonsumsi BBM lainnya, seperti bensin atau solar, karena mereka tidak mempunyai kendaraan bermotor.

Penuturan Jumali misalnya dapat menjadi contoh. Dia mengungkapkan bahwa dirinya tidak mengonsumsi minyak tanah, karena untuk memasak dia menggunakan kayu bakar dan untuk menyalakan api cukup menggunakan daun kelapa kering. Oleh sebab itu dia tidak pernah membeli minyak tanah, seperti dituturkannya :

> "U*ntuk apa saya beli minyak tanah, wong untuk masak cukup mencari kayu bakar di tegalan sudah dapat banyak, (dengan demikian) lebih hemat dan tidak pusing mikir harga minyak yang terus naik*

Efektivitas dalam Menanggulangi Dampak Kenaikan BBM

Salah satu tujuan pemerintah meluncurkan program SLT adalah sebagai kompensasi bagi rak-yat miskin atas kenaikan BBM, sehingga diharapkan rakyat miskin tetap mampu untuk membeli BBM yang telah dinaikkan harganya. Namun dengan besaran yang hanya Rp 100.000,00 per bulan ternyata maksud tersebut tidak dapat tercapai sepenuhnya. Pemerintah hanya memperhitungkan aspek kenaikan BBM-nya saja, namun aspek ikutannya yaitu kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok tidak dikalkulasi secara cermat. Akibatnya kebijakan SLT di lapangan ternyata tidak sepenuhnya efektif sesuai dengan tujuan awal.

Kasus Bu Saisah dapat dipakai sebagai contoh hal diatas. Dalam sebulan rumah tangga Bu Saisah mengkonsumsi minyak tanah kurang lebih 20 liter. Jika harga minyak tanah sebelum kenaikan adalah Rp 700,00 kemudian saat ini di tingkat pengecer naik menjadi Rp 2.500,00 maka dana tambahan yang diperlukan untuk membeli minyak adalah Rp 36.000,00 sebulan. Sementara kenaikan BBM juga membawa dampak terhadap harga beras yang semula Rp 3.000,00 per kg menjadi Rp 4.500,00 per kg sehingga keluarga Bu Saisah yang setiap bulan mengkonsumsi beras 30 kg harus mengeluarkan biaya ekstra Rp 45.000,00. Belum lagi biaya tambahan untuk membeli minyak goreng, sayuran, lauk-pauk, gula, sabun cuci, kenaikan tarif listrik, dan sebagainya yang jika ditotal membutuhkan lebih dari Rp 100.000,00.

Penuturan Ngasiani juga dapat menjadi gambaran bahwa kenaikan BBM meskipun sudah dikompensast dengan SLT, masih tetap merupakan beban berat baginya.

> *"Dulu sebelum harga-harga pada naik saja saya sudah hidup susah, apalagi sekarang yang harga-harga sudah naik. Kalau boleh memilih sebenarnya saya lebih sutra harga- harga tidak usah naik daripada saga dapat bantuan tapi tidak cukup memenuhi kebutuhan"*

Kondisi yang sama juga dialami oleh Taspan. Setelah adanya kenaikan BBM pengeluaran keluarga Pak Taspan meningkat, akan tetapi penghasilanya masih sama saja seperti biasa. Padahal sebelum adanya kenaikan BBM-pun pemenuhan kebutuhan hidupnya belum mencukupi, apalagi setelah adanya kenaikan BBM hal ini semakin memberatkan keluarga Pak Taspan.

Keadaan yang tidak jauh berbeda dengan juga diungkapkan oleh Palal, salah seorang responder yang masih mempunyai tanggungan tiga orang anak. Dia mengungkapkan bahwa setelah kenaikan harga BBM, pemenuhan kebutuhan ekonomi semakin sulit, khususnya pada bidang konsumsi seperti beras dan gula. "Harga-harga semakin mahal uang seperti tidak ada nilainya!" begitu ungkapnya.

Kurang efektifnya SLT dalam mengatasi dampak kenaikan BBM juga diperlihatkan oleh kenyataan bahwa hampir semua informan hanya mampu memanfaatkan dana SLT paling lama satu bulan, padahal pemerintah mengasumsikan dana SLT tersebut diperuntukkan untuk kebutuhan selama tiga bulan.

Bu Saisah misaInya mengungkapkan bahwa dana sebesar Rp. 300.000,00 yang seharusnya diperuntukkan untuk tiga bulan, temyata hanya mampu dipakai untuk kebutuhan selama satu atau dua minggu saja.

> "*...mboten cekap mas nek kangge tigang wulan. Paling seminggu napa kalih minggu sampun telas kangge butuh kathah (...tidak cukup kalau untuk tiga bulan. Paling satu dua minggu sudah habis untuk kebutuhan banyak)*"

Ngasiani, seorang narasumber yang menderita jantung dan asma, menghabiskan dana SLT yang dia terima hanya dalam waktu satu minggu, karena dia langsung memanfaalkannya untuk membeli obat seharga Rp. 200.000,00 dan sisa uangnya dipakai untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Dia mengatakan:

> *"Tidak (cukup)! Bayangin saja mas. uang segitu sampai mana? Kalau satu setengah juta ya cukup!"*

Meskipun dipandang kurang efektif sesuai dengan, tujuannya dan tidak bisa menutup kenaikan biaya hidup akibat kenaikan harga, BBM, namun para penerima dana SLT tetap merasa bersyukur karena sedikit banyak dana tersebut dapat membantu untuk tambahan kebutuhan sehari-hari. Seperti diungkapkan oleh Taspan:

> *"Diparingi duit kok mboten purun to mas, kulo diparingi mawon sampun alhamdulillah. Sing jenenge duit, akeh sithik nggih mesti berguna to mas " (Diberi uang kok tidak mau, saya diberi saja sudah sangat bersyukur. Yang namanya uang sedikit atau banyak pasti bermanfaat)*

Hal yang sama diungkapkan oleh Saisah, meskipun dana tersebut hanya bisa bertahan selama satu minggu atau paling lama satu bulan, dia sudah cukup berterimakasih diberi dana tersebut clan dana tersebut sangat membantu kehiduan sehari-hari.

Hal lain yang kurang efektif dari program SLT adalah tanggapan dari sebagian informan yang memandang bantuan SLT sebagai bantuan cuma-cuma yang tidak memerlukan kerja keras. Kebijakan model sinterklas seperti yang terjadi dalam penyaluran SLT ini akan menimbulkan dampak negatif, karena dapat membentuk mental masyarakat menjadi mental peminta-minta yang selalu mengharap bantuan tanpa mau bekerja keras, serta ketergantungan dalam pemenuhan kebutuhan hidup terhadap pemerintah. Seperti yang dikatakan oleh seorang informan

> *"Siapa sih yang tidak mau diberi uang cuma-cuma tanpa harus susah? Semua orang pasti mau! Saya juga senang kalau bantuan ini diadakan terus"*

SIMPULAN

Bantuan dana Subsidi Langsung Tunai (SLT) cukup membantu masyarakat miskin dalam mengatasi dampak kenaikan harga BBM, yang berimbas pula pada kenaikan berbagai kebutuhan pokok clan kebutuhan rumah tangga lainnya.

Besaran bantuan SLT sebesar Rp 100.000,00 per bulan belum sepenuhnya efektif untuk mengcover kebutuhan masyarakat miskin yang membengkak sejak kenaikan harga BBM. Pola penyaluran yang diberikan per tiga bulan juga memiliki banyak kelemahan. Dana SLT yang seharusnya diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan selama tiga bulan, ternyata banyak yang sudah habis dalam waktu satu-dua minggu sejak diterimakan. Namun hal ini juga terjadi karena pola hidup masyarakat yang belum sepenuhnya dapat memahami manajemen keuangan secara baik, sehingga alokasi pengeluaran tidak didasarkan pada perencanaan, namun lebih banyak berdasar keperluan yang bersifat spontanitas.

Penggunaan dana SLT oleh masyarakat juga memiliki banyak keragaman. Ternyata juga dimanfaatkan dana SLT uga d'manfaatkan untuk hal-hal yang sebenarnya tidak sesuai dengan peruntukan yang dirancang pemerintah, misalnya untuk membayar hutang, untuk keperluan sosial nwimbang, serta untuk keperluan pen2obatan yang seharusn-va sudah dialokasikan oleh pemerintah melalui ASKES bagi keluarga miskin. Pola pemberian bantuan kepada